

AKTUALISASI NILAI-NILAI *TASAMUH* DALAM KEHIDUPAN POLITIK DI INDONESIA

Muh. Haras Rasyid

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM)

DPK. Universitas Islam Makassar (UIM).

E-mail: muhammadharas1234@gmail.com

Abstract:

Meaning of the title is to revive and apply the values of tasamuh, as mutual respect between fellow elements of the Indonesian nation, both citizens and individuals, especially those who engage in politics. This article is inspired by the reality of politics that is widely occurring which involves not only interested parties in the political arena, but also ordinary people who are dragged into the political vortex. Likewise, not only on political issues that are the central theme, but also social and religious issues are polished and played from time to time make the intensity increases at the height of the political event. For this reason, the actualization of tasamuh as one of the ideal concept in political life, nation and religion is a necessary thing, to present in the midst of Indonesian society reducing heat of political tension.

Abstrak:

Makna dari judul tersebut adalah menghidupkan dan menerapkan nilai-nilai *tasamuh*, yaitu saling menghargai antara sesama elemen bangsa Indonesia, baik warga masyarakat secara individu maupun kelompok khususnya yang beraktifitas dalam dunia politik. Tulisan ini terinspirasi oleh realitas perpolitikan secara luas terjadi yang bukan hanya melibatkan pihak yang berkepentingan dalam arena panggung politik, tetapi juga masyarakat awam ikut terseret dalam pusaran politik. Demikian pula, bukan hanya pada persoalan politik yang menjadi tema sentral, tetapi juga persoalan sosial keagamaan ikut dipoles dan dimainkan dari waktu ke waktu kemudian intensitasnya meningkat pada setiap waktu puncak perhelatan politik tiba. Untuk itu, aktualisasi *tasamuh* sebagai salah satu konsep yang ideal dalam kehidupan berpolitik, berbangsa dan beragama merupakan hal yang niscaya, hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia untuk meredam tensi politik yang memanas.

Kata Kunci: Nilai-Nilai, Tasamuh, Politik Indonesia

I. PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang memiliki ajaran yang lengkap dan universal. Islam Tidak saja membicarakan persoalan kehidupan akhirat atau tidak hanya membicarakan tentang hubungan manusia dengan Allah swt., tetapi Islam sarat dengan ajaran yang membahas tentang kehidupan dunia atau interaksi antara manusia dengan manusia dan makhluk yang lain. Demikian pula, Islam tidak hanya diterima dan dianut pada wilayah tertentu saja, tetapi Islam sebagai agama yang dianut oleh sebahagian manusia di seluruh dunia.

Sebagai agama yang disebut *rahmatan lil alamain*, ajaran Islam selalu menekankan

adanya keseimbangan antara aktivitas kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Salah satu makna dari kehidupan seimbang adalah pada setiap aktivitas kehidupan dunia tidak bisa dilupakan kehidupan akhirat. Begitu juga, dalam melaksanakan kehidupan akhirat harus didukung oleh kehidupan dunia. Khusus dalam aktivitas kehidupan dunia yang berkaitan pada persoalan politik, ajaran Islam menyiapkan aturan untuk dijadikan sebagai pedoman agar kehidupan politik yang dijalankan oleh seseorang tidak menyimpang dari ajaran Islam dan tatanan-tatanan lain yang tumbuh dalam masyarakat.

Salah satu prinsip yang memiliki muatan ajaran Islam yang tinggi adalah prinsip *tasamuh*. Prinsip ini adalah ajaran mendasar yang bersumber dari ajaran Islam yang penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan dalam hubungan manusia dengan manusia. *Tasamuh* adalah istilah yang muatannya menghendaki adanya saling menghargai antara seseorang dengan orang lain antara satu kelompok kecil atau besar dengan kelompok yang lain dalam aktivitas kehidupan apa saja, baik dalam hubungannya dengan kehidupan keagamaan maupun kehidupan keduniaan.

Kaitannya dengan kehidupan politik di Indonesia prinsip apa pun yang mengandung unsur kemaslahatan tidaklah haram untuk diterapkan di dalamnya. Kehidupan politik, tidak saja memerlukan garis pedoman yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang tertulis, tetapi kehidupan politik juga membutuhkan nilai-nilai etika sebagai aturan tidak tertulis, seperti halnya nilai-nilai *tasamuh*. Sebab tidak jarang terjadi, oknum atau kelompok, karena mengabaikan atau melanggar nilai-nilai etika bisa berakibat fatal. Artinya, meskipun menurut hukum positif Indonesia tidak berdampak langsung kepada pidana, tetapi tanpa disadari kalau seseorang terbiasa melanggar nilai etika dalam kehidupan politiknya, justru dapat mengantarkannya kepada hukuman pidana dan hukuman sosial.

Problema yang muncul di tengah-tengah pergolakan politik di Indonesia, yaitu adanya perilaku para insan politik yang terlihat (kalau tidak dikatakan tidak) menimal dikatakan kurang memperhatikan etika dalam kehidupan politiknya. Sudah menjadi pemandangan umum, baik lewat ucapan maupun perbuatan para pelaku politik dinegeri ini tidak menjunjung tinggi nilai-nilai *tasamuh* demi kepentingan politik kelompoknya. Bahkan demi nafsu kepentingan politik, mereka dengan berani membawa-bawa isu agama atau yang dikenal dengan isu SARA dengan versinya yang ekstrim tidak menghargai dan menyalahkan pilihan politik pihak lain. Kondisi seperti ini, menyebabkan tidak jarang terjadi komplik horizontal antar kelompok dalam masyarakat, karena dipicu oleh ulah segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab dalam kehidupan politik di Indonesia.

Mengatasi problema kehidupan politik di Indonesia sekarang dan yang akan datang, aktualisasi nilai-nilai *tasamuh* adalah salah satu pilihan dari berbagai pilihan. Aktualisasi nilai-nilai *tasamuh* tidak dapat dianggap sebagai

wacana yang tidak memiliki makna, tetapi harus menjadi salah satu tolok ukur dari martabat dan keberhasilan kehidupan politik di Indonesia. Tanpa menjadikan nilai-nilai *tasamuh* sebagai pedoman etika yang mendesak dalam pergolakan politik saat ini dan yang akan datang, maka bisa dibayangkan bagaimana kehidupan politik dari generasi ke generasi.

II. PEMBAHASAN

A. Konsep Dasar *Tasamuh*

Ajaran Islam kaya dengan istilah yang mengandung makna yang luas dan dalam dan jika diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan sangat bermanfaat bagi seseorang dan masyarakat secara umum. Misalnya dalam ajaran Islam terdapat istilah *tawassut* dan *tawazzun*.¹ Kedua istilah ini memiliki makna ajaran sosial yang sangat tinggi. Istilah *tawassut*, jika dikontekstualkan mengandung makna kesederhanaan atau tidak berlebihan, baik masalah kebutuhan hidup maupun masalah sikap, pikiran dan tutur kata. Sedangkan *tawazzun* dapat dimaknai sebagai keseimbangan, yaitu dalam bertindak hendaknya berlaku adil, tidak berlaku dzalim baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.

Setara dengan kedua istilah di atas, istilah *tasamuh* juga mengandung makna yang bisa diterapkan pada berbagai aspek kehidupan, baik pada aspek keagamaan maupun pada aspek sosial dan politik. *Tasamuh* berasal dari kata bahasa arab yang berakar kata *samuha* yang berarti murah hati, senag berderma, lemah lembut dan pemaaf.² Salah satu variasi dari kata *samuha* adalah istilah *tasamuh* yang berarti "toleransi". Toleransi berasal dari bahasa inggeris, yakni *tolerance*, artinya lapang dada, sabar dan dapat menerima.³

Makna lain dari *tasamuh* adalah bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian, pen-

¹Tawassut berarti tengah-tengah, yaitu sikap yang selalu mengambil jalan tengah dan tidak ekstrim. Tawazzun berarti seimbang dalam segala hal termasuk dalam penggunaan dalil aqli dan naqli. Lihat Muhyiddin Abdushshomad, *Hujjah NU-Aqidah-Tradisi* (Cet.IV; Surabaya: Khalista, 2010), h. 7.

²Lihat A.W. Munawwir Kamus al-Munawwir *Arab Indonesia Terlengkap* (Cet. XIV; Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), h. 657.

³John M.Echols dan Hasan Sadily, *Kamus Inggeris Indonesia* (Cet. XXVI; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 595.

dapat, pandangan, keyakinan, kebiasaan dan adat istiadat orang atau kelompok lain yang berbeda atau bertentangan dengan apa yang terdapat pada diri sendiri.⁴

Istilah *Tasamuh* dalam pengertian umum adalah suatu sikap yang menunjukkan akhlak terpuji dalam pergaulan sesama manusia. Sikap seperti ini diperlukan dalam tatanan interaksi untuk mendorong terciptanya rasa saling menghargai antara berbagai komponen dalam masyarakat, baik antar individu maupun antar kelompok. Sikap *tasammuh* banyak disuarakan oleh para tokoh agama yang berfikir moderat dan pemerhati nilai pentingnya persatuan dalam kehidupan berbangsa bernegara.

Sikap *tasamuh* dapat ditafsirkan pada dua macam, yaitu penafsir negatif dan penafsiran positif. Penafsiran negatif menyatakan bahwa *tasamuh* hanya mensyaratkan cukup dengan membiarkan, tidak mengganggu atau tidak menyakiti orang atau kelompok lain. Penafsiran positif menyatakan bahwa *tasamuh* membutuhkan lebih dari sekedar *tasamuh* negatif, yaitu membutuhkan bantuan aktif, baik dukungan moril maupun materil terhadap keberadaan dan aktifitas kelompok lain.⁵

Sesuai dengan maknanya, nilai-nilai *Tasamuh* dapat diterapkan pada berbagai lini kehidupan. Meskipun *tasamuh* banyak diolah dalam persoalan bidang keagamaan,⁶ tetapi pada dasarnya nilai-nilai *tasamuh* sangat relevan diterapkan terhadap aspek kehidupan yang lain, seperti aspek politik. Aspek ini adalah salah satu aspek yang menentukan perjalanan suatu bangsa, sebab sangat berpotensi mempengaruhi aspek-aspek vital yang lain, seperti aspek keamanan, aspek ekonomi.

⁴Lihat M. Cholil Nafis, *Fikih Kebangsaan Studi Historis dan Konseptual Perlindungan Kehidupan Beragama dalam Negara Bangsa* (Cet. I; Jakarta: Mitra Abadi Press, 2015), 109.

⁵Lihat M. Cholil Nafis, *Fikih Kebangsaan Studi Historis dan Konseptual Perlindungan Kehidupan Beragama dalam Negara Bangsa*, h. 109-1010.

⁶Misalnya: *Tasamuh* antara sesama yang beragama Islam; saling tolong menolong, saling harga menghargai, saling sayang menyayangi dan menjauhkan dari saling curiga mencurigai. *Tasamuh* terhadap yang bukan beragama Islam; menghargai hak-hak mereka selaku manusia, sesama anggota masyarakat dan sebagai umat beragama dalam suatu negara. Lihat H. Munzier Saputra dan H. Harjani Hefni (editor), *Metode Dakwah* (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 142.

Bahkan yang paling kental adalah ketika aspek ini mempengaruhi aspek penegakkan hukum dan keadilan.

Negara Republik Indonesia khususnya adalah negara “plural”, yaitu memiliki banyak agama, suku, budaya, adat istiadat dan latar belakang politik yang berbeda-beda. Suatu negara plural diperlukan sebuah konsep yang dapat diterapkan agar perbedaan itu tidak menimbulkan komplik, tetapi sebaliknya perbedaan itu bisa menjadi sebuah modal dan kekuatan dalam pembangunan bangsa. Untuk itu, nilai-nilai *tasammuh* merupakan salah satu solusi sebagai sebuah konsep yang dapat meredam grjolak atau benturan yang mungkin terjadi antar dan intern suku yang banyak, antar dan intern pemeluk agama serta antar dan intern para pelakon politik.

B. Realitas Politik di Indonesia

Politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan, seperti sistem pemerintahan, dasar pemerintahan. Segala urusan dan tindakan, kebijaksanaan, siasat dan lain-lain mengenai pemerintahan negara, baik dalam negeri maupun hubungannya dengan negara lain.⁷ Segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk memengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu macam bentuk susunan masyarakat.⁸

Kehidupan politik dalam satu negara sedikit banyaknya dipengaruhi oleh keadaan masyarakatnya, seperti yang terkait dengan banyaknya penduduk, luas wilayah, tingkat kehidupan ekonomi, perilaku, adat istiadat, pemikiran dan keyakinannya. Negara Republik Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang berpenduduk terbanyak (urutan ke 4 setelah Tiongkok, Amerika Serikat dan India) dan memiliki wilayah yang luas. Seperti diketahui Indonesia juga sebagai negara plural, sehingga dibutuhkan slogan yang bisa menjaga realitas plural tersebut. Menyikapi realitas itu, muncullah simbol Bhineka Tunggal Ika, pemikiran pluralisme, nasionalisme dan toleransi antar anak bangsa.

Dari berbagai hal yang mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia,

⁷Lihat Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. II Edisi III; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 886.

⁸Lihat Daliar Noer, *Pengantar Pemikiran Politik* (Jakarta: Rajawali, 1983), h. 6.

salah satunya adalah kehidupan politik. Negara apa dan dimanapun di dunia, tidak ada yang dapat melepaskan dirinya dari kehidupan politik, apalagi pada negara yang menyebut dirinya negara demokrasi. Indonesia adalah salah satu negara demokrasi yang disebut demokrasi Pancasila. Sebagai negara demokrasi prinsipnya menjunjung tinggi persamaan, menghargai kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi dan lain-lain oleh setiap warga negaranya. Dengan alasan demokrasi perjalanan dan pergulatan politik di Indonesia sangat kental dihiasi oleh berbagai macam keinginan dari komponen atau kelompok yang terdapat dalam bingkai edintitas warga negaranya.

Banyak hal yang turut memberi andil dan memengaruhi proses politik di alam demokrasi Indonesia, yang tidak dapat diingkari bagaikan pisau bermata dua, pada satu sisi berdampak positif, tapi pada sisi lain terkadang berakibat negatif. Paling tidak terdapat dua hal yang dinilai memberikan irama dan mengiringi dalam menentukan merdu redupnya perpolitikan di Indonesia.

1. Politik kebangsaan

Indonesia sebagai negara demokrasi, pilar demokrasi yang ada di dalamnya di antaranya adalah “partai politik”.⁹ Pilar demokrasi (partai politik) inilah sebagai salah satu komponen yang memberikan andil dan distribusi politik dalam menentukan denyut jantung perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberadaan partai politik adalah salah satu bahagian komponen bangsa, yang tentu saja keberadaan dan perannya bernilai positif. Namun pada sisi lain, tidak dapat dielakkan adanya penilaian yang miring yang

ditujukan bukan kepada partai politiknya, tetapi dialamatkan pada sebahagian dari oknum-oknum yang mengelola partai politik.

Politik kebangsaan pada hakikatnya menekankan pada aspek yang mementingkan kepentingan umum atau mengutamakan kepentingan rakyat, bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Politik kebangsaan mempersempit jarak perbedaan menuju titik persamaan, atau selalu mengedepankan titik temu dari pada titik perbedaan, atau mengutamakan persamaan daripada perbedaan. Politik kebangsaan tidak memelihara potensi komplik atau selalu berusaha menghindari komplik dan selalu membangun pondasi perdamaian atau selalu mencari jalan maslahat.

Sangat jelas, sejak Negara Republik Indonesia (NKRI) didirikan atau diproklamkan kemerdekaannya, para pendirinya yang terdiri dari berbagai macam latar belakang agama, suku, budaya dan asal daerah, sepakat dalam merumuskan dan melahirkan sebuah ideolog Pancasila sebagai kritalisasi dari kehidupan rakyat yang ada dalam wilayah NKRI. Demikian pula mereka berhasil membuat sebuah konstitusi, yaitu UUD 1945 sebagai hukum dasar yang harus dipatuhi dan dipedomani dalam hidup dan kehidupan berbangsa dan negara. Sebagai sebuah bangsa yang plural, eksistensi Pancasila dan UUD 1945 hadir sebagai pemersatu dan sebagai hukum tertinggi yang menjiwai dan tidak bisa bertentangan dengan seluruh hukum dan peraturan yang berlaku di NKRI.

Kehidupan politik di Indonesia harus berasaskan dengan Pancasila dan UUD 195. Olehnya itu, bagi siapa saja yang memiliki hak kehidupan politik, baik individu maupun kelompok selama tidak bertentangan dengan dasar negara tersebut, tidak ada yang bisa melarangnya dan memaksanya dalam memilih dan menyalurkan aspirasi politiknya. Pancasila dan UUD 1945 memberikan kebebasan yang seluas-luasnya bagi semua warga negara dalam NKRI untuk menentukan kehidupan politiknya, selama tidak saling melanggar antara satu dengan yang lain dan bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Politik kebangsaan yang berlaku di Indonesia salah satunya mengacu pada politik Bhineka Tunggal Ika (berbeda-beda tapi satu). Filosofi dari politik kebangsaan seperti ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia lebih mementingkan persatuan dari pada perbedaan. Berbagai macam perbedaan yang mengitari

⁹Partai adalah perkumpulan (segolongan orang) yang seases, sehaluan dan setujuan. Partai politik adalah perkumpulan yang didirikan untuk mewujudkan ideology politik tertentu. Lihat Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 831. Misalnyadi Indonesia, partai politik nasional yang akan mengikuti pemilihan umum 2019 sebanyak 16 partai, yaitu: Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Garuda, Partai Berkarya, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Amanat Nasional, Partai Hanura, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan dan Persatuan. Ditambah dengan Partai local yang di Aceh.

kehidupan bangsa Indonesia adalah *sunnatullah* (ketetapan Allah swt) yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Boleh berbeda, karena hal itu adalah keniscayaan yang tidak bisa ditolak, namun perbedaan itu bukan sebagai ancaman dan malapetaka, tetapi adalah sebagai potensi dan modal yang berharga untuk saling belajar antar perilaku dan budaya kehidupan anak bangsa, modal untuk saling mengetahui kelebihan dan saling mengisi kekurangan serta saling menopang untuk memajukan bangsa Indonesia.

Empat pilar yang ada dalam kehidupan politik kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika), memberikan inspirasi yang sangat positif pada pelaku politik yang ikut bertarung dalam kanca regulasi rutinitas politik lima tahunan dan kegiatan-kegiatan politik insidental yang lain. Betapa tidak, kalau politik kebangsaan di bawa empat pilar itu dipahami dan nilai-nilainya diterapkan dengan baik, maka gesekan-gesekan politik yang mengarah kepada tindakan negatif, kalau tidak bisa dihindari minimal bisa dikurangi. Gesekan-gesekan politik dalam alam dunia demokrasi, utamanya dalam politik praktis adalah sebagai bumbunya yang menunjukkan dinamisnya kehidupan politik di manapun negara di dunia ini. Hanya saja, gesekan politik yang mengarah kepada pikiran dan tindakan yang ekstrim, tidak saling menghargai antara satu dengan yang lain, fitnah, intimidasi, kebohongan, saling curiga mencurigai dan sebagainya, itu adalah bukan wajah sebuah bangsa yang beradab. Bahkan kalau hal seperti itu terus terjadi pada setiap perhelatan politik dan seluruh komponen bangsa tidak menyadari sebagai hal yang berbahaya dalam kehidupan berbangsa, bahkan terkesan dipelihara, maka perpecahan antar komponen bangsa, bukan mustahil akan terjadi.

2. Politik Keagamaan

Indonesia adalah negara yang mengakui beberapa agama, antara lain agama Islam, agama Kristen, agama Hindu dan agama Budha. Agama-agama ini secara resmi dan disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasa 29 ayat. Sila 1 dari Pancasila juga memberikan dasar tentang kehidupan beragama di Indonesia, yaitu semua warga negara Indonesia harus percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan dasar tersebut, maka secara hukum semua warga negara Indonesia harus menyatakan dirinya memeluk salah satu agama yang diakui oleh negara. Selain itu, dengan adanya proteksi

negara tersebut, sehingga pemeluk agama bebas menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya sekaligus tidak dibenarkan saling mengganggu antara pemeluk agama yang satu dengan yang lain.

Kebebasan beragama di Indonesia, keberadaannya bukan hanya diterapkan disekitar ritual keagamaan saja, seperti melaksanakan salat di masjid bagi pemeluk agama Islam dan kebaktian di gereja bagi pemeluk agama Kristen, tetapi diluar tembok-tembok masjid dan gereja pun kebebasan beragama hadir. Kebebasan beragama dimaksud adalah semua aspek kehidupan warga negara Indonesia, seperti aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek politik dengan berbagai macam kondisi, model dan kadar intensitasnya mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia saat ini.

Sesuai dengan realitas, khususnya kehidupan politik adalah sangat akrab dengan kehidupan keagamaan, sehingga muncul istilah politik keagamaan, dan lebih ekstrim muncul istilah politisasi agama. Munculnya istilah seperti ini, utamanya ketika bersamaan dengan perhelatan politik, karena untuk mencapai tujuan bagi yang punya kepentingan politik, isu-isu keagamaan laris-manis disuarakan oleh para pelaku politik. Politik keagamaan adalah agama dijadikan sebagai kendaraan politik. Sentimental-agama dijadikan sebagai bukan hanya sekedar penghias, tetapi menjadi ujung tombak dalam mencapai ambisi politik. Olehnya itu, tidak mengherankan jika terdapat sebahagian atau oknum pelaku politik apakah secara individu atau kelompok, apakah secara terorganisir-sistematis atau insidental, menghalalkan segala cara dengan menggunakan simbol-simbol keagamaan untuk menjatuhkan lawan politiknya.

Realitas politik keagamaan di Indonesia tidak dapat dielakkan, karena selain penduduknya yang banyak dan secara administrasi harus memeluk agama (dibuktikan pada Kartu Tanda Penduduk), juga karena kentalnya dikotomi agama yang satu dengan agama yang lain dalam politik. Sebagai ilustrasi, agama yang mayoritas dipeluk oleh penduduk Indonesia adalah agama Islam, sehingga calon pemimpin, baik di yudikatif, legislatif apalagi eksekutif yang bukan dari pemeluk agama Islam disuarakan oleh orang-orang yang punya kepentingan agar calon tersebut jangan dipilih. Bahkan disertai dengan ancaman, kalau terdapat orang Islam yang diketahui memilih calon pemimpin yang bukan beragama Islam, maka hak keagamaanya dalam masyarakat tidak akan

diberikan, antara lain tidak dishalati jenazahnya kalau yang bersangkutan meninggal dunia. Contoh kasus seperti ini terjadi pada pemilihan gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Calon pemimpin yang bukan beragama Islam yang dikehendaki untuk tidak dipilih, sekalipun dapat dimengerti dari sisi emosi keagamaan, tetapi kurang tepat kalau dikampanyekan secara luas dan terbuka, karena dapat menganggu persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara juga bertentangan dengan politik ketatanegaraan yang tidak mendikotomi hak-hak politik seluruh warga negara Indonesia.

Betapa masyipnya politik keagamaan mewarnai kehidupan politik di Indonesia, sehingga terkadang ada calon pemimpin yang beragama Islam, juga dikesankan, dicurigai dan dituduh sebagai bukan pemeluk Islam yang taat, tidak pro Islam, tidak pro ulama dan memusuhi agamanya sendiri. Bukan hanya terhadap pribadi calon pemimpin Islam tersebut yang dimusuhi, tetapi juga terhadap para pendukungnya dianggap sebagai penghianat Islam. Paling fatal yang dilakukan oleh para pihak yang radikal dalam politik keagamanya adalah hanya karena perbedaan pendapat dan pilihan, lawan politiknya yang sesama muslim dihukumkan kafir. Padahal diantara mereka selaku pendukung salah satu calon yang diusungnya untuk menjadi pemimpin, juga terdapat orang-orang yang tidak beragama Islam.

Fakta yang dapat dikatakan sebagai sesuatu yang ironis di atas, adalah sesuatu yang banyak mewarnai kehidupan politik kekinian di Indonesia. Politik keagamaan yang sejatinya diarahkan dan dipraktikkan kepada hal yang positif, tetapi justru diselewengkan kepada hal-hal yang negatif. Politik keagamaan tidak lagi berada pada koridor yang semestinya, karena sudah mengenyampinkan dari nilai-nilai *tasamuh*. Politik keagamaan yang menekankan saling menghargai pilihan dan pendapat keagamaan, tidak lagi dijadikan sebagai tolok ukur utama, dan dikalahkan oleh kepentingan dan ambisi politik yang menghalalkan segala cara.

Politik dan agama adalah sesuatu yang tidak bertentangan dan sangat indah dan mulia jika betjalan seiring. Kehidupan politik adalah sifatnya mu'amalah atau dominannya untuk kepentingan dunia. Agama adalah selain membahas tentang kehidupan akhirat juga membicarakan tentang kehidupan dunia. Aspek dunia yang juga dibicarakan dalam agama khususnya agama Islam adalah politik

(*siyashah*). Agama hadir dalam membicarakan dan mempraktikkan politik untuk memberikan norma atau filter agar dalam berpolitik tidak ada kerusakan yang ditimbulkan. Kerusakan atau kerugian dasarnya adalah sesuatu yang bukan hanya kehidupan agama yang melencanya tetapi naluri manusia dalam kehidupannya di dunia tidak ada yang menghendakinya. Olehnya itu kehidupan agama yang prinsip utamanya untuk kemeslahatan (lawan dari kerusakan) sangat sesuai dengan politik yang tentu memiliki tujuan untuk kemaslahatan.

Politik keagamaan hakikatnya positif jika diarahkan kepada hal yang positif. Perlunya agama mewarnai politik dimaksudkan agar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara paling kurang tidak memisahkan agama dengan politik secara hitam putih yang biasanya disebut "sekuler".¹⁰ Namun jika politik keagamaan diterapkan berlebihan yang tidak mengindahkan hak-hak berpendapat orang lain sekalipun seagama dan menghargai keyakinan pemeluk agama lain, maka hal itu sangat berbahaya karena berpotensi memecah belah umat dan bangsa. Istilah politisasi agama saat ini yang pada dasarnya sah-sah saja, tetapi kenyataannya cenderung digunakan untuk kepentingan politik sesaat dan negatif. Politisasi agama digunakan untuk memaki-maki, mencela, menghina mengancam, menghukum orang lain munafiq, kafir dengan legitimasi agama menurut pemahamannya sendiri, tanpa menerima pemahaman orang atau golongan lain.

C. Nilai-nilai *Tasamuh* dalam Kehidupan Politik Indonesia

Kata nilai dapat dihubungkan kepada sesuatu yang bersifat materi dan non materi. Bersifat materi, misalnya nilai harga sebuah barang, sedangkan non materi, seperti nilai suatu perbuatan yang baik atau tidak baik, dalam ajaran Islam biasanya disebut pahala dan dosa. Demikian pula mengandung makna yang

¹⁰Sekular (sekuler), suatu masyarakat yang berhaluan duniawi, artinya semakin berpaling dari agama atau semakin kurang mempedulikan nilai-nilai atau norma-norma yang dianggap kekal. Lihat Tim Penyusun Ensiklopedi Indonesia, *Insiklopedi Indonesia* (Jilid V, Jakarta: Ikhtiar Baru-Van Hoeve, 1984), h. 3061. Sekularisme adalah paham atau pandangan yang berpendirian bahwa moralitas tidak perlu didasarkan pada ajaran agama. Lihat Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1015.

bisa positif dapat juga negatif, tergantung dimana, apa dan bagaimana kata nilai itu dipasangkan. Kalau kata nilai itu dipasangkan kepada hal-hal tidak bermanfaat, maka kesan yang ditimbulkan kata nilai itu adalah negatif, contoh nilai seorang pencuri di mata masyarakat. Jika nilai dihubungkan dengan hal-hal yang baik dan benar, maka muatan dari kata nilai itu positif, contoh nilai atau penghargaan masyarakat terhadap orang yang dermawan. Untuk itu, dapat dipahami suatu perbuatan atau sikap yang baik adalah mengandung nilai-nilai yang baik dan akan bermanfaat kepada orang yang memiliki nilai yang baik dan sangat dapat berdampak baik kepada masyarakat secara umum.

Salah satu sikap baik yang dimiliki oleh baik secara individu ataupun secara kelompok adalah *tasamuh*. Seperti diketahui dan menjadi pandangan umum, *tasamuh* adalah suatu sikap yang melahirkan sebuah perbuatan baik dalam hal dapat memahami dan menghargai perbuatan dan pendapat pihak lain. Memahami dan menghargai pihak lain dari apa pun yang dilakukan, apapun pendapat dan keyakinannya, selama hal itu mengandung unsur masalah dan dibutuhkan bagi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, maka sependapat atau tidak sependapat, senang atau tidak senang harus dihargai dengan menunjukkan sikap toleran.

Dalam kehidupan politik di Indonesia saat ini, yang berbagai macam ragam model dan sikap yang ditunjukkan oleh para pelaku politik, kehadiran dan aktualisasi nilai-nilai *tasammuh* adalah dibutuhkan. Bukan lagi sekedar cerita, tetapi sudah kenyataan ditengah hiruk politik saat ini (boleh jadi akan bersinambungan), antara seorang dan kelompok politik “saling menyerang” antara satu dengan yang lain. Dengan membabi buta, tidak terkontrol oleh akal sehat pihak satu menyalahkan pihak yang lain, alasan apapun yang dilontarkan oleh pihak lain selama tidak seirama atau merugikan kepentingannya, amaka akan ditolak mentah-mentah walaupun argument pihak lain tersebut mengandung unsur kebenaran.

Menghalalkan segala cara dan in-toleran antara satu kelompok dengan kelompok yang lain adalah menjadi pemandangan yang setiap saat bisa disaksikan. Apa yang dilakukan, baik melalui pikiran, ucapan maupun perbuatan, kalau hal itu dapat menjatuhkan pihak lawan, maka akan berusaha mencari pembenaran, walaupun pendapat umum yang berdasarkan agama, kesusilaan dan hukum negara tidak

membenarkan. Demi kepentingan politik, penegak hukum, hukum dan sanksi yang ditimbulkan, tidak lagi menjadi tolok ukur utama untuk mencapai ambisi politik. Sebab para pelaku politik menganggap apa yang mereka lakukan adalah benar dan tidak merugikan pihak lain. Ketika perbuatan mereka tidak disadari atau disadari melanggar hukum, dan penegak hukum mensangkakan sebagai sebuah perbuatan kejahatan atau pidana, maka mereka menganggap penegak hukum melakukan tindakan “kriminalisasi”.

Walaupun silit, tapi bukan berarti tidak bisa, aktualisasi nilai-nilai *tasamuh* adalah salah satu jalan keluar dalam membawa kehidupan di di Indonesia ke jalan yang benar. Namun untuk menumbuhkan kesadaran para pelaku politik khususnya dan masyarakat secara umum dibutuhkan waktu dan pemikiran dari para pihak yang memiliki pikiran jernih dan tidak terlibat dalam pertarungan politik. Kompleksnya persoalan yang mewarnai kehidupan politik di Indonesia, menjadikan aktualisasi nilai-nilai *tasamuh* tidak semudah membalikan telapak tangan untuk diterapkan.

Besarnya penduduk dan wilayah Indonesia, latar belakang dan tingkat kehidupan, budaya dan agama adalah diantara kendala yang harus ditembus dalam mengaktualisasikan nilai-nilai *tasamuh*. Besarnya penduduk Indonesia sedikit atau banyak memiliki pengaruh terhadap kehidupan politik yang berkembang di Indonesia. Negara lain yang memiliki penduduk yang relatif kecil, seperti Singapura, kehidupan politiknya tidak sama sensitifnya dengan di Indonesia. Meskipun sebahagian kecil, tetapi warga negara yang memusatkan perhatiannya terhadap kehidupan politik, utamanya kehidupan politik praktis jauh lebih banyak dibandingkan dengan negara yang berpenduduk dan wilayahnya kecil.

Setiap lima tahun di Indonesia beberapa kali dilakukan perhelatan politik. Walaupun sudah dilakukan pemilu serentak, tetapi Pemilihan Kepala Daerah (Bupati, Wali Kota dan Gubernur) beberapa kali diselenggarakan setiap lima tahun, ditambah dengan pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan anggota DPD. Kondisi riil seperti itu, karena besar dan luasnya wilayah terdiri dari puluhan wilayah Tk. I (provinsi) dan ratusan wilayah Tk. II (Kabupaten/kota), menyebabkan kehidupan politik sangat besar dan dinamis. Demikian pula di setiap daerah terdapat lembaga politik, yaitu DPRD Tk. I dan DPRD Tk. II (kecuali DKI Jakarta), juga

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang anggotanya di pilih di setiap provinsi. Khusus pemilihan presiden dan wakil presiden, menambah tensi politik karena banyaknya pihak, seperti Partai Politik di setiap wilayah yang dilibatkan dan penduduk yang besar ikut menggunakan hak pilihnya.

Keadaan penduduk dan wilayah yang dilibatkan dalam kehidupan politik tersebut, menyebabkan gesekan dan persaingan politik di masyarakat sangat tinggi, sehingga untuk mengaktualisasikan nilai-nilai *tasamuh* di dalamnya memerlukan perencanaan, cara dan proses yang dapat dimengerti dan dilakukan oleh para pelaku politik dan pendukungnya. Sebab tidak dapat disangkal bahwa segala kegiatan yang melibatkan banyak orang yang memiliki kepentingan yang berbeda, maka akan sangat berpotensi untuk terjadinya kesalahpahaman dan tidak mengerti antara satu dengan yang lain. Sebenarnya para pelaku dan pemerhati politik di Indonesia, besar kemungkinan sadar dan sangat mengerti bahwa nilai-nilai *tasamuh* tersebut, seperti saling menghargai, saling memberi kesempatan adalah sesuatu yang baik dalam interaksi kehidupan politik. Tetapi karena mereka sementara dalam keadaan memperjuangkan kepentingan yang membutuhkan pengorbanan materi dan tidak ingin gagal, maka kebenaran nilai-nilai *tasamuh* diabaikan.

Konsensus dari negara demokrasi seperti Indonesia adalah menimbulkan salah satu efek kebebasan yang tidak terkontrol. Kebebasan yang tidak terkontrol adalah kebebasan yang tidak tersalur menurut ajaran “demokrasi” yang sebenarnya, seperti memperhatikan etika, hukum agama dan hukum nasional. Kondisi seperti ini, mau atau tidak mau, senang atau tidak senang itulah kenyataan yang sulit diingkari khususnya sejak bergulirnya era reformasi di Indonesia. Dengan alasan demokrasi, seseorang atau kelompok bebas menyuarakan pendapatnya yang terkesan tidak mengenal tempat dan waktu, walaupun apa yang mereka lakukan sangat jelas mengganggu kepentingan orang atau kelompok lain. Ketika terdapat pihak lain yang bermaksud baik, apakah dari pihak aparat keamanan atau masyarakat umum untuk bersikap santun dan menyampaikan pendapatnya sesuai dengan etika dan peraturan yang ada, mereka menolaknya dengan alasan Hak Asasi Manusia. Padahal pada sisi lain mereka tidak sadar bahwa apa yang dilakukannya adalah melanggar hak-hak orang atau pihak lain.

Bersikap *tasamuh* pada siapa, kapan, dimana dan dalam hal apa saja utamanya dalam masalah kehidupan politik, pada dasarnya adalah sebuah kewajiban yang menjadi hukum sosial, selama diterapkan sesuai dengan unsur dan tujuan utamanya, yakni untuk kebaikan bersama. Mengapa disebut hukum sosial, sebab naluri manusia selalu ingin senang dan mau pada kebaikan. Makhluk yang namanya binatang saja, tidak ada yang mau diganggu dan mau senang, apalagi manusia. Oleh karena itu kalau seseorang atau kelompok manusia mengganggu yang lain, sedikit banyaknya pasti melawan. Demikian pula, salah satu kebutuhan manusia adalah penghormatan dan penghargaan. Ketika dalam aktifitas kehidupan politik seseorang diganggu dan tidak dihargai, maka sangat berpotensi terjadi bentrok dan konflik antara satu dengan yang lain.

Perbedaan dan pertentangan adalah bagian dari kehidupan manusia. Perbedaan dan pertentangan dalam arena politik adalah hal yang tidak bisa dihindari. Namun perbedaan yang membawa kepada pertentangan pendapat, baik dalam persoalan keyakinan agama maupun dalam bidang pilihan politik, diperlukan adanya sikap *tasamuh* dengan mengedepankan pernyataan yang argumentatif dengan bahasa yang santun didasari sikap penuh kasih sayang dan menjauhi kebencian. Sebab sejarah telah mencatat, perpecahan dan pertentangan yang menyebabkan konflik dan permusuhan banyak disebabkan oleh sikap yang berakar dari kebencian. Olehnya itu dengan mengembangkan sikap *tasamuh* yang dikembangkan dalam kehidupan politik di Indonesia, selain semakin memperkuat keyakinan spiritual juga kebencian yang sampai menyorot sesama anak bangsa akan dapat dihilangkan.¹¹

Salah satu hal yang menarik pada kehidupan politik di Indonesia adalah adanya aspek agama yang menjadi bumbu yang dicampurkan di dalamnya, sehingga menimbulkan stigma dosa dan kafir. Bagi kelompok yang merasa dirinya sangat Islami dan ekstrim, maka kelompok lain yang tidak mau mengikutinya dianggapnya berdosa. Bahkan pada hal-hal tertentu, misalnya pada pemilihan pemimpin, seperti presiden dan kepala daerah, jika kelompok yang ekstrim menganggap calon pemimpin yang dipilihnya adalah sosok yang

¹¹Lihat Umar Shihab, *Kapita Selekta Mozaik Islam, Ijtihad, Tafsir, dan Isu-isu Kontemporer* (Cet. I, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2014), h. 195-196.

Islami, maka kelompok moderat yang tidak ikut pada mereka dan memilih calon pemimpin lain, maka kelompok moderat tersebut digolongkan sebagai orang-orang kafir.

Dalam sejarah pemikiran Islam, baik persoalan teologi, fikih, hadis dan ilmu-ilmu keislaman lainnya, banyak ditemukan bagaimana para ulama menerapkan nilai-nilai *tasamuh*. Para ulama dengan keilmuan yang dimilikinya tidak berat hati apabila ada ulama lain yang berbeda pendapat dengannya. Sebaliknya, mereka saling mengapresiasi perbedaan pendapat sebagai rahmat. Seberapa tinggi sikap *tasamuh* mereka, sehingga ulama besar Ibnu Hajar al-Haitami pernah mengatakan, “mazhab (pendapat) kami benar, tetapi mengandung kekeliruan. Demikian juga mazhab (pendapat) yang lain keliru, tetapi mengandung kebenaran”. Abu Hanifah berkata, apa yang kami ucapkan hanyalah pendapat. Hal ini yang terbaik kami capai. Kalau ada orang yang berpendapat lebih baik daripada kami, boleh jadi dia paling dekat dengan kebenaran dibanding kami. Pernyataan yang senada juga diungkapkan oleh Imam Sayuthi yang menyatakan, ketahuilah bahwa *ikhtilaf* (perbedaan) berbagai mazhab di kalangan umat Islam adalah nikmat dan anugerah yang agung. Dalam perbedaan tersebut, di dalamnya tersembunyi rahasia yang diketahui oleh orang-orang yang mengerti (*‘alim*) dan tidak disadari oleh orang-orang yang bodoh (*jahil*).¹²

Menyimak pernyataan para ulama besar di atas memberikan inspirasi dan *tarbiyah* khususnya terhadap umat Islam Indonesia untuk tidak bersikap fanatik dan ekstrim kepada pendapat pribadi atau kelompok sendiri dan tidak bersikap *tasamuh* pada pendapat orang lain. Pendapat yang benar adalah pendapat kelompoknya, pendapat kelompok lain salah. Sebaliknya para ulama tersebut menuntun kepada jalan yang mulia sebagai jalannya orang-orang yang berilmu, yaitu sikap *tasamuh* yang mengedepankan sikap terbuka, menghargai dan menghindarkan diri dari sikap sinis dan benci.

Dalam kehidupan politik Indonesia saat ini, keteladan yang diberikan oleh para ulama dalam bersikap tersebut adalah hikmah yang menjadi referensi yang besar dan sangat bermakna. Sikap *tasamuh* urgen diterapkan

dalam kehidupan politik dan keagamaan di Indonesia. Karena kenyataan yang disaksikan diberbagai media, sikap tidak saling menghargai, saling memojokkan, saling menyalahkan, sikap hanya ingin menang sendiri dan sikap-sikap negatif yang lain, setiap saat dipertontonkan oleh para elit politik dan pemuka agama. Boleh jadi, dampak dari sikap para elit politik dan ahli agama tersebut, sehingga dalam interaksi kehidupan masyarakat secara umum juga dengan mudah didapatkan sikap yang sama dalam menanggapi setiap ada perhelatan politik di Indonesia. Olehnya itu, menghilangkan sikap-sikap negatif yang melanggar nilai-nilai moral, agama dan aturan yang berlaku, diperlukan usaha kontiniu dan terarah bagi semua pihak utamanya para elit politik dan para pemuka agama agar nilai-nilai *tasamuh* dapat dipahami dengan baik dan dipraktikkan secara luas oleh seluruh masyarakat Indonesia.

III. KESIMPULAN

1. *Tasamuh* adalah istilah dari bahasa arab yang populer dalam wacana keagamaan dan sangat ideal diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti kehidupan politik. *Tasamuh* dalam bahasa Indonesia antara lain maknanya adalah “toleransi”, yaitu saling menghargai, menghormati baik berkenaan pemikiran maupun perilaku yang dinilai mengandung unsur konstruktif agar tidak terjadi komplik, kebencian dan permusuhan dalam masyarakat.
2. *Tasamuh* dalam bidang politik kebangsaan dan keagamaan merupakan suatu keniscayaan dalam bingkai ke Indonesiaan. Hal itu dipahami, karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang plural, yakni selain wilayah dan penduduknya besar juga memiliki banyak macam etnis, budaya, adat istiadat dan agama yang berbeda-beda. Kondisi seperti ini, menjadikan konsep *tasamuh* penting untuk diterapkan pada masyarakat, agar kebhinekaan tetap terjaga. Dengan kata lain diantara mereka yang plural tersebut tumbuh sikap saling menghargai, menghormati antara satu dengan yang lain, baik dalam hal etnis budaya, adat istiadat maupun agama.
3. *Tasamuh* dalam bidang politik di Indonesia, bukan hanya sekedar penting diaktualisasikan pada setiap moment perhelatan politik lima tahunan, tetapi harus menjadi bagian tak terpisahkan dengan kepribadian bangsa Indonesia khususnya bagi yang

¹²Lihat Umar Shihab, *Kapita Selekta Mozaik Islam, Ijtihad, Tafsir, dan Isu-isu Kontemporer*, h. 182.

bergelut di dunia politik. Sebab realitas yang kental melekat pada kondisi perpolitikan di Indonesia, persoalan yang menyimpang dari nilai-nilai *tasamuh* yang dipragakan oleh para elit politik setiap saat terjadi walaupun bukan pada moment perhelatan politik lima tahunan pada semua tingkatan berokrasi pemerintahan. Meskipun diakui intensitas dan skalanya berbeda atau menurun dibandingkan dengan saat-saat pemilihan pucuk pemerintahan, misalnya Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, tetapi penyimpangan nilai-nilai *tasamuh* selalu ada. Hal tersebut bisa terjadi, karena keinginan berkuasa tidak pernah surut pada hati dan pemikiran mereka, sehingga dari awal sudah mengatur strategi, diprogramkan dengan cara-cara yang tidak jauh beda dengan ketika berada pada detik-detik puncak perebutan kekuasaan diantara mereka.

DAFTAR PUTAKA

- Abdusshomad, Muhyiddin. *Hujjah NU-Aqidah-Tradisi*, Cet. IV; Surabaya: Khalista, 2010.
- Echos, John M. dan Hasan Sadily. *Kamus Inggris Indonesia*, Cet. XXVI; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Munawwir, A.W.. *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Cet. XIV; Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Nafis, M.Cholil. *Fikih Kebangsaan Studi Historis dan Konseptual Perlindungan Kehidupan Beragama dalam Negara dan Bangsa*, Cet. I; Jakarta: Mitra Abadai Press, 2015.
- Noer, Dalier. *Pengantar Pemikiran Politik*, Jakarta: Rajawali, 1983.
- Saputra, H. Munzir dan H.Harjani Hefni. *Metode Dakwah*, Cet.III; Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2009.
- Shihab, Umar. *Kapita Selekta Mozaik Islam, Ijtihad, Tafsir dan Isu-isu Kontemporer*, Cet.I; Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2014.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II; Edisi III; Jakarta: Balai Pustaka, 2002.